

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan di segala bidang yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melaksanakan tujuan nasional. Tentu pembangunan tersebut membutuhkan sumber finansial yang sangat besar, termasuk penerimaan pajak.

Berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, pada masa tersebut tujuan utama pembangunan adalah mempercepat kemajuan di berbagai sektor dan membangun struktur ekonomi yang kokoh dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan kekuatan unik dari setiap wilayah. Dengan demikian, setiap daerah dapat berkembang sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah negara. Untuk mencapai tujuan RPJMN dan visi Indonesia Maju tahun 2045, pemerintah mengalokasikan APBN setiap tahun. APBN ini mencakup penetapan target pendapatan dan alokasi anggaran belanja negara yang strategis untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional, yang bertujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat fondasi ekonomi dan sosial negara.

Program pembangunan nasional memerlukan sumber dana yang besar, termasuk penerimaan pajak. Hingga saat ini, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 75% total penerimaan negara. Hal serupa juga terjadi di sebagian besar negara yang mayoritas pendapatan negaranya berasal dari pajak. Praktik ini sejalan dengan teori pembangunan yang menyatakan bahwa penerimaan pajak mempunyai fungsi anggaran selain fungsi regulasi.

Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2022. Pajak terdiri dari berbagai jenis dan diklasifikasikan menjadi pajak pusat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Penghasilan (PPH), dan Bea Materai, serta pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak rokok, di antara lain. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi pajak langsung, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPH), serta pajak tidak langsung, seperti pajak eksporimpor, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif, yang mempertimbangkan kemampuan keuangan wajib pajak, dan pajak objektif, seperti PPN, yang dikenakan pada barang dan jasa tertentu. Selain pajak, terdapat pungutan lain yang meliputi retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan, yang juga berperan penting dalam pendanaan operasional negara dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah mengenakan pajak berdasarkan empat prinsip utama. Pertama, asas keadilan yang berarti pembayaran pajak disesuaikan dengan tingkat ekonomi setiap individu. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan, dan dana pajak tersebut dikelola dengan bijak untuk kepentingan umum. Kedua, asas kepastian hukum yang menekankan pentingnya aturan yang jelas sehingga masyarakat tahu apa yang dikenai pajak, siapa yang dikenai pajak, berapa besar pajak yang harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya. Ketiga, asas kenyamanan yang berarti pembayaran pajak harus dilakukan tepat waktu, misalnya melalui pemotongan gaji, bunga deposito, dan lainnya, serta dapat dilakukan melalui prosedur yang sederhana seperti pajak online. Terakhir, asas ekonomi yang memastikan bahwa hasil dari pemungutan pajak lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkannya.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pelaporan perpajakan terus berkembang dari pelaporan manual menjadi pelaporan elektronik. Mulai dari tahun

2014, Direktorat jenderal Pajak menyediakan situs online atau biasa yang disebut DJP Online, situs ini berisi berbagai macam aplikasi perpajakan yang bisa dipergunakan oleh PKP untuk menyampaikan SPT melalui e-SPT. Tujuannya untuk menimalisir kecurangan yang sering terjadi pada saat pelaporan pajak terutang dan menyederhanakan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan.

Seluruh rangkaian dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh Wajib Pajak. Tetapi banyak kendala selalu dirasakan oleh pengguna, yaitu tidak pahamnya prosedur sehingga pengguna merasa sulit dalam melakukan autentikasi pengolahan data karena sistem online terhubung dengan penggunaan internet. Penggunaan e-SPT lebih efisien karena meskipun Wajib Pajak telah diperbolehkan menggunakan sarana elektronik untuk penyampaian SPT, SPT induk masih harus disampaikan dalam bentuk asli. Hal ini menyebabkan proses administrasi tetap memakan waktu dan tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan dokumen fisik, sehingga mengurangi manfaat dari penggunaan teknologi elektronik dalam pelaporan pajak. Beberapa kendala dari penggunaan *e-Billing* yaitu *server error* dan salah penginputan atau tidak terdaftarnya kode akun pajak dan kode setoran. Beberapa kendala melaporkan pajak tersebut perlu adanya prosedur yang tepat agar Wajib Pajak mengikuti prosedur dengan baik dan benar.

Dalam konteks ini, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan SPT Masa Pajak sangat penting. Hampir setiap institusi di Indonesia dan seluruh dunia memiliki SOP. Bukan hanya di sektor pemerintahan dan pendidikan, tetapi juga di sektor lain, seperti perusahaan outsourcing, yang memerlukan SOP di setiap departemen. Misalnya, PT Kajang Lako menggunakan SOP untuk memastikan semua kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan standar dan untuk mengevaluasi kinerja karyawan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah izin mutlak yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan sebelumnya. SOP merupakan seperangkat instruksi tertulis yang digunakan untuk aktivitas umum atau berulang. Sistem ini berfungsi sebagai acuan dan landasan hukum untuk membantu kelancaran proses bisnis antara manajer, karyawan, departemen keuangan, dan pihak-pihak terkait dalam suatu perusahaan.

Menurut Sailendra (2015), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran serta efisiensi kerja dan operasional sebuah organisasi atau perusahaan. Berdasarkan definisi ini, Tjipto Atmoko (2011) menjelaskan bahwa SOP adalah instruksi terperinci yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya dan berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja, baik di lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, serta di sektor usaha dan non-usaha. SOP ini disusun berdasarkan pengetahuan teknis, administratif, dan prosedural yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang berlaku di unit terkait. Oleh karena itu, SOP harus diterapkan dengan benar dan konsisten setelah ditetapkan oleh perusahaan, karena pelaksanaan yang tidak optimal dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kinerja dan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan.

Dalam penulisan ini penulis akan menerapkan dan mengangkat judul **“Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan SPT Masa Pajak di PT. Kajang Lako”** Disini penulis ingin memberikan dan mencoba menerapkan SOP terkait yang telah dianalisis dan ditinjau dari unsur utama SOP meliputi efisiensi, konsistensi, pengurangan kesalahan, penyelesaian masalah, dan perlindungan tenaga kerja.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok laporan penulis adalah:

1. “Apa saja kendala PT. Kajang Lako sebelum adanya Standar Operasional Prosedur yang jelas?”.

2. “Bagaimana rancangan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan SPT Masa Pajak PT. Kajang Lako?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok masalah sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui berbagai aktivitas Bagian Keuangan PT. Kajang Lako Jambi.
2. Mengidentifikasi dan memahami berbagai hambatan serta tantangan yang timbul selama proses pelaporan pajak dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi sebelum Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun SOP untuk meminimalisir kendala yang terjadi.
3. Untuk memberikan kontribusi dan mengetahui hasil rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan SPT Masa Pajak PT. Kajang Lako Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang, masalah pokok, dan tujuan penulisan, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan SPT Masa pajak dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mengelola administrasi perpajakan pada PT. Kajang Lako, khususnya dalam pelaporan SPT Masa Pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- Melaksanakan salah satu persyaratan akademik yang esensial dalam rangka menyelesaikan program studi dan memperoleh Ijazah DIlpoma

III Program Studi Perpajakan Fakultas, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.

- Memperluas wawasan serta pengalaman mahasiswa sekaligus berfungsi sebagai media aplikasi praktis dari teori-teori akademik yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam konteks dunia kerja yang sebenarnya.
- Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi di dunia kerja.

b. Bagi Perusahaan

- Sebagai masukan, saran dan dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan.
- Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan proses pelaporan dengan baik.

c. Bagi Universitas

- Sebagai sumbangsih pengetahuan.
- Hasil kegiatan ini diharapkan nantinya dapat digunakan menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penulisan serupa khususnya pada program studi perpajakan.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan magang ini mencakup dua kategori utama:

1. Data Primer

Diperoleh langsung dari perpustakaan subjek peneliti dengan menggunakan laporan informasi sebelumnya mengenai topik sebagai sumber pencarian informasi.

2. Data Sekunder

Data ini dikumpulkan langsung dari perusahaan terkait, mencakup informasi seputar sejarah singkat instansi, perkembangan entitas Badan Usaha Instansi, struktur organisasi, serta visi dan misi yang menjadi bagian integral dari instansi tersebut.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpul data yang dilakukan penulis mencakup beberapa bagian sebagai berikut:

1. Data Observasi

Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi tempat pengumpulan data untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang menjadi fokus penelitian Tugas Akhir.

2. Data Wawancara

Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan staf/pegawai PT. Kajang Lako untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

3. Data Kepustakaan

Metode pengumpulan data ini melibatkan tinjauan terhadap literatur atau referensi terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam laporan, guna mendapatkan landasan teori dan informasi yang relevan.

4. Menelusuri (*Browsing/Searching*)

Proses pencarian data dilakukan dengan menjelajahi internet untuk mencari informasi yang tepat dan relevan dalam penyusunan laporan magang.

5. Metode Analisis

Metode analisis yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam fakta, peristiwa, situasi, fenomena, variabel, dan kondisi yang relevan dalam proses penelitian, dengan tujuan menyajikan gambaran yang akurat tentang realitas yang terjadi.

6. Waktu dan Lokasi Magang

Magang dilakukan diperusahaan PT. Kajang Lako yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani NO. 18, Kel. Telanaipura, Kota Jambi. Telepon 0822 8119 5393. Waktu magang dilaksanakan selama 60 hari atau 2 bulan dimulai pada tanggal 20 Februari 2024 s.d 03 Mei 2024.

7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konteks laporan, termasuk latar belakangnya, masalah utama yang dibahas, serta tujuan dan manfaat dari penyusunan laporan. Metode penulisan yang digunakan mencakup jenis data yang diambil, cara pengumpulan data, metode analisis yang diterapkan, durasi magang, serta sistematika penulisan yang akan diikuti.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II mendiskusikan landasan teori yang relevan dengan topik penulisan. Ini mencakup semua aspek yang mendukung pemahaman terhadap isu atau fenomena yang diteliti, berdasarkan pada literatur dan teori-teori yang ada.

BAB III PEMBAHASAN

Bab III menggambarkan secara rinci lokasi magang, melalui analisis yang sistematis terhadap kesesuaian kegiatan dengan instrumen teori untuk mengidentifikasi masalah yang relevan. Selain itu, bab ini menjelaskan tentang judul laporan dan bagaimana konten laporan dapat diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV merangkum secara singkat permasalahan yang telah dibahas dalam laporan, serta solusi dan saran dari penulis untuk memperbaiki situasi yang terkait di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

